



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN DI KECAMATAN DEDAI KABUPATEN SINTANG

Rupinus<sup>1</sup>, Arifin<sup>2</sup>, Tora Akadira<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Universitas Terbuka, <sup>2</sup>Universitas Tanjung Pura

Email: [rupinus.roep.rr@gmail.com](mailto:rupinus.roep.rr@gmail.com)<sup>1</sup>, [idris.arifin@yahoo.com](mailto:idris.arifin@yahoo.com)<sup>2</sup>, [toraakadira@ecampus.ut.ac.id](mailto:toraakadira@ecampus.ut.ac.id)<sup>3</sup>

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Menerima : 07 Oktober 2023  
Revisi : 11 Oktober 2023  
Diterima : 27 Oktober 2023

#### Kata Kunci:

Wajib belajar sembilan tahun

### ABSTRAK

Program wajib belajar sembilan tahun merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong terwujudnya akses pendidikan yang bermutu di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun di kecamatan Dedai, kabupaten Sintang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Area penelitian adalah sekolah negeri dan swasta jenjang sekolah menengah pertama di kecamatan Dedai. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan pola analisis interaktif, sementara penarikan kesimpulan secara induktif melalui proses triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun di kecamatan Dedai yakni (1) faktor sosial, ekonomi dan tingkat pendidikan orangtua siswa yang rendah sehingga menghambat siswa untuk mengakses pendidikan secara lebih berkualitas, (2) faktor geografis, jarak tempuh dari rumah ke sekolah yang memakan waktu 3-4 jam di musim hujan dan kemarau sehingga mempersulit siswa mengikuti pelajaran, (3) akses teknologi internet dan listrik yang masih belum memadai sehingga berdampak pada kemampuan teknologi guru dan siswa dalam mengakses pembelajaran (4) kebijakan pendidikan yang belum sinkron dan berpihak pada pengembangan dan pemenuhan akses pendidikan secara merata bagi siswa di sekolah pedalaman dan pedesaan. Agar program wajib belajar sembilan tahun dapat berhasil maka diperlukan evaluasi dan perbaikan kebijakan secara utuh sesuai dengan permasalahan pendidikan di daerah.

#### Keywords:

nine years of compulsory education

### ABSTRACT

The nine-year compulsory education program is the government's effort to improve the quality of human resources and encourage access to quality education in the regions. This research aims to describe the implementation of the nine-year compulsory education program in Dedai sub-district, Sintang district. The research method used is qualitative research. The research area is public and private schools at junior high school level in Dedai sub-district. Data collection techniques use interview techniques, observation and documentation studies. Data analysis uses interactive analysis patterns, while conclusions are drawn inductively through a process of triangulation of techniques and sources. The results of this research show that there are several factors that determine the success and failure of implementing the nine-year compulsory education program in Dedai sub-district, namely (1) social, economic factors and the low level of education of students' parents, which prevents students from accessing higher quality education, (2) geographical factors, the distance from home to school which takes 3-4 hours in the rainy and dry seasons, making it difficult for students to attend lessons, (3) access to internet technology and electricity which is still inadequate, which has an impact on the technological capabilities of teachers and students in accessing learning (4) education policies that are

#### Korespondensi:

#### Rupinus

Universitas Terbuka

Email:

[rupinus.roep.rr@gmail.com](mailto:rupinus.roep.rr@gmail.com)



*not yet synchronized and support the development and fulfillment of equal access to education for students in remote and rural schools. In order for the nine-year compulsory education program to be successful, it is necessary to fully evaluate and improve policies in accordance with regional education problems.*

## PENDAHULUAN

Secara konstitusional gagasan kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun telah diamanhkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomer 20 tahun 2003. Pada bab I pasal 1 point (18) dinyatakan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah (Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Program wajib belajar menjadi tanggungjawab negara kerana setiap warganya memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Hak pendidikan tersebut tidak hanya sebatas mendapatkan pendidikan formal semata namun pendidikan yang bermutu atau pendidikan dengan kualitas yang menjamin semua aspek kehidupan manusia terbangun sesuai yang diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional. Dalam bab IV pasal 5 jelas diungkapkan dalam undang-undang pendidikan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, bahkan warga negara dengan kelainan fisik, mental, emosional mendapatkan pendidikan khusus, termasuk warga negara yang ada di wilayah pelosok, terpencil dan terbelakang memperoleh layanan khusus.

Bahasa konstitusional dalam undang-undang pendidikan tidak sekedar mengandung sebuah pernyataan pentingnya pendidikan namun sebuah imperatif dalam perwujudan mencapai tujuan bangsa. Dalam mewujudkan tujuan bangsa negara membutuhkan peran mitra pemerintah pusat dan daerah, orangtua dan masyarakat agar bahu-membahu mewujudkan wajib belajar sembilan tahun yang memberi landasan dasar bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam bab IV pasal 7,9, 10,11 menguraikan tanggungjawab dan kewajiban serta hak orangtua, masyarakat dan pemerintah bahwa dari anak usia wajib belajar orang tua berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Masyarakat berkewajiban memberikan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan yang berlaku, serta berkewajiban menyediakan layanan dan kemudahan dan menyediakan dana bagi terselenggaranya pendidikan bagi siswa usia 7-15 tahun.

Implementasi pesan konstituional tersebut dalam pelaksanaannya di setiap wilayah dan daerah memiliki tantangan dan kesulitan yang beragam. Tantangan dan kesulitan tersebut bisa bersumber dari kondisi ekonomi, sosial, budaya dan politik maupun



dari aspek sosiologis, geografis, topografis maupun kesiapan infrastruktur pendidikan di setiap satuan pendidikan di masing-masing daerah. Implementasi program wajib belajar sembilan tahun tidak lepas dari kondisi dan faktor-faktor tersebut yang sangat menentukan keberhasilan program wajib belajar. Evaluasi wajib belajar sembilan tahun dalam implementasi kebijakan baru wajib belajar 12 tahun diungkapkan bahwa wajib belajar sembilan tahun belum tuntas dan rampung sehingga program wajib belajar 12 tahun perlu memperhatikan jalannya wajib belajar sembilan tahun yang sudah diprogramkan lebih dahulu. Seto Mulyadi pegiat anak mengungkapkan bahwa ia mendukung wajar 12 tahun, tetapi tidak mengabaikan nasib wajar 9 tahun yang belum tuntas sebab angka putus sekolah baik Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama masih memprihatinkan, bahkan di kota besar masih ada siswa sekolah dasar dan sekolah menengah yang putus sekolah (Indra, 2012).

Pemenuhan hak atas pendidikan harus dikembalikan pada anak, tidak hanya soal akses pendidikan tetapi juga dalam proses pembelajaran yang berkualitas di ruang-ruang kelas di setiap satuan pendidikan. Agar pendidikan tersedia dan mampu memenuhi hak anak maka pemerintah perlu menjamin pendidikan dasar tanpa biaya dan wajib belajar bagi semua anak entah dalam rentang 9 tahun maupun 12 tahun, akses pendidikan dan layanan mutu dalam proses belajar harus diberikan secara layak, baik adil dan setara (Dike.D, 2017; Herwanto, 2007).

Dalam merealisasi program wajib belajar sembilan tahun pemerintah Indonesia menetapkan empat strategi dasar pembangunan di bidang pendidikan yaitu : (1) pemerataan kesempatan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan baik melalui jalur pendidikan di sekolah maupun jalur di luar sekolah. (2) Perlunya keterkaitan atau keterhubungan (*link and match*) antara pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja di berbagai bidang kehidupan (3) Peningkatan kualitas pendidikan yang ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas tenaga, sarana dan prasarana pendidikan dengan kebutuhan kemajuan pembangunan (4) Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan (Ismail, 2014).

Kebijakan yang baik ini membangun optimisme yang besar bagi masyarakat di daerah pedalaman dan perbatasan seperti Kalimantan Barat. Namun demikian harapan ideal ini dalam konteks pendidikan dan akses pendidikan di daerah masih mengalami masalah atau kendala termasuk di kecamatan Dedai kabupaten Sintang. Ade beberapa faktor penyebab yang membuat empat agenda prioritas pemerintah tersebut belum berjalan optimal dan maksimal di daerah pedalaman atau perbatasan. Faktor sosial dan ekonomi turut memberi andil meskipun program pemerintah seperti bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar) sudah cukup menolong siswa dari kalangan ekonomi lemah namun belum semua siswa bisa mengakses pendidikan secara adil, merata dan setara. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang pada tahun 2020 merilis angka penduduk miskin di

kabupaten Sintang berkisar 40% dengan IPM cenderung meningkat di angka 67 % dan angka partisipasi kerja cenderung menurun dari tahun 2014 dan mulai perlahan naik di tahun 2020 dengan kisaran angka partisipasi sebesar 75% (BPS Kabupaten Sintang, 2020). Beberapa faktor ini dipengaruhi oleh minimnya kegiatan penyuluhan dan pembinaan yang bersifat kontinu dan berkelanjutan membuat kesadaran masyarakat atas pendidikan masih di pedesaan, perbatasan dan pendalaman masih belum membaik yang dipengaruhi juga oleh laju produk domestik bruto sejak tahun 2019 mengalami penurunan secara tajam bersamaan dengan datangnya pandemi covid 19 meskipun pada bidang lain seperti pembangunan gender meningkat ke angka 87,5 %. Ada korelasi yang jelas antara faktor ekonomi dan kebijakan politik di daerah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia yang secara umum terlihat meningkat tetapi cukup lambat. Hal-hal dan situasi semacam ini mendorong peneliti untuk mengkaji lebih jauh melihat implementasi program wajib belajar sembilan tahun dan saat ini marak diwacanakan wajib belajar 12 tahun. Ini fenomena yang menarik karena wajib belajar 9 tahun saja masih belum mampu mewujudkan empat program sasaran utama dari pemerintah dan sekarang diwacanakan program wajib belajar 12 tahun. Seperti apa pemerataan pembagunaan di bidang pendidikan, relevansi, mutu dan efisiensi program wajib belajar sembilan tahun yang telah dilaksanakan selama ini secara khusus di Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Faktor sosial, lingkungan, budaya pendidikan, faktor lingkungan politik

dan kebijakan politik di bidang pendidikan (Daniel Dike et al., 2020), serta faktor kemajuan dan perkembangan teknologi (Jamun, 1996; Soedjono, 2022) ikut berpengaruh dalam implementasi program wajib belajar sembilan tahun di kecamatan Dedai.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif studi kasus (*case study*) karena pendekatan penelitian meneliti kondisi alamiah subjek dengan setting natural (Stake, 2005; Sugiyono, 2013). Desain studi kasus dipilih karena memfokuskan pada sebuah case yang terkait dengan implementasi program wajib belajar sembilan tahun di kecamatan Dedai pada dua sekolah. Yin menjelaskan bahwa studi kasus merupakan strategi yang dipilih yang berkenaan dengan menjawab pertanyaan tentang *how* dan *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) dalam kehidupan nyata (Yin, 2009). Studi kasus (*case study*) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengkaji secara lengkap dan mendalam (*indepth study*) mengenai implementasi program wajib belajar sembilan tahun di kecamatan Dedai kabupaten Sintang, sehingga mengungkapkan karakteristik yang terdapat dalam kasus yang diteliti dengan tujuan menghasilkan sebuah acuan pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun (Baxter & Jack, 2008; Denzin & Lincoln, 2011).



Penelitian dilaksanakan di dua sekolah SMP Negeri dan Swasta di Kecamatan Dedai. Pemilihan lokasi ini menggunakan teknik *purposive sampling area* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan indikator-indikator yang telah dibuat oleh peneliti (Sugiyono, 2007). Dua sekolah ini mewakili karakteristik sekolah negeri dan swasta yang letaknya tidak jauh dari pusat kota. Waktu penelitian berlangsung selama satu tahun dari tahun 2020-2021. Subyek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, siswa, orangtua, camat kecamatan Dedai. Kriteria penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data yang didasari oleh pertimbangan bahwa pihak-pihak tersebut dianggap kompeten, berwenang, memahami dan mengetahui tentang data yang diperlukan (Creswell, 2015). Partisipasi dari informan sangat penting dalam memperoleh gambaran lengkap dan komprehensif tentang fokus penelitian (Dike et al., 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam implementasi program wajib belajar sembilan tahun ada beberapa aspek atau faktor penentu yaitu:

### A. Faktor Lingkungan Sosial Ekonomi, Geografis dan Akses Transportasi

Permasalahan pendidikan tidak lepas dari peran lingkungan sosial dan masyarakat, tempat tinggal dimana masyarakat menjadi satu komponen ruang.

Secara geografi ada hubungan dan pengaruh timbal balik antara penduduk dengan keadaan alam demi kemakmuran dan kesejahteraan hidupnya. Ruang geografis adalah pusat dibangunnya ekonomi masyarakat, jadi tempat, lokasi, keadaan alam menentukan tingkat penghasilan dan kesejahteraan masyarakat yang kemudian bermuara pada komponen pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sintang dan camat Dedai memiliki satu pandangan yang sama bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan dimana orang tua siswa adalah petani, buruh dan pedagang sangat mempengaruhi tingkat pendidikan anak-anak mereka. Hal ini yang mempengaruhi kemampuan orangtua dalam menyekolahkan anak-anak mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Di SMP Negeri maupun Swasta di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang dari hasil penelitian sebagai berikut *Jumlah tanggungan keluarga Orang Tua Murid Sekolah Menengah Pertama Negeri maupun Swasta menyatakan bahwa tanggungan Orang Tua dalam keluarga di Kecamatan Dedai rata-rata tanggungan orang Tua sebanyak 3-5 orang dalam keluarga mereka.* Dengan demikian menjadi jelas bahwa di daerah Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang jumlah tanggungan masing-masing kepala keluarga sebanyak kurang lebih tiga sampai dengan lima orang, dapat dikatakan bahwa jumlah tanggungan kepala keluarga di Kecamatan Dedai termasuk dalam



golongan tinggi. Hal ini juga yang menghambatnya implementasi program wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang.

Kondisi geografis dan kondisi sosial ekonomi yang berdampak pada pilihan pekerjaan orangtua siswa yang mayoritas petani ladang dan petani di perkebunan menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun. Di kecamatan Dedai orang tua murid kebanyakan bekerja sebagai petani baik perkebunan maupun pertanian ladang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga. Mayoritas dari orangtua siswa tidak tamat sekolah Dasar (SD) dan sekolah menengah Pertama (SMP), dan hanya sebagian kecil yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan demikian jelas bahwa perbedaan tingkat pendidikan orang tua berpengaruh terhadap kesempatan pendidikan anak. Namun demikian dalam masyarakat telah tumbuh kesadaran untuk sekolah dan memperoleh pendidikan yang baik. Dari hasil wawancara beberapa Kepala Sekolah SMP Negeri dan Swasta di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang disimpulkan bahwa orang tua yang tinggal dalam masyarakat yang cukup berpendidikan akan mendorong anaknya untuk bersekolah dan melanjutkan pendidikan di sekolah yang baik dan terus melanjutkan ke jenjang selanjutnya minimal mampu menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sembilan tahun yang diprogramkan dan diwajibkan oleh pemerintah.

Hal yang masih menghambat terlaksananya pendidikan wajib belajar

sembilan tahun adalah karena jarak sekolah, jarak antara rumah dan sekolah. Kominenjarak oleh ahli geografi lebih memahami sebagai beberapa bagian menarik dari distribusi suatu kawasan, karakteristik, vegetasi, tanah, iklim serta karakteristik masyarakat yang hidup di dalamnya apakah mampu beradaptasi atau bahkan mendominasi lingkungan mereka. Ada beberapa hal yang bisa ditarik dari signifikansi biaya dan jarak seperti kualifikasi jarak geografi yang dapat dinyatakan juga dalam wujud biaya atau ongkos pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua siswa yang berperan dalam kepengurusan komite sekolah mengungkapkan bahwa:

“jarak dari rumah siswa menuju ke sekolah di sebagian besar wilayah kecamatan Dedai Kabupaten Sintang cukup jauh, siswa harus menpuh jarak yang jauh dan harus melawati bukit, sungai dan hutan dengan durasi waktu sekitar 3 sampai 4 jam. Situasi ini yang menghambat dan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun di kecamatan Dedai.”

Keterjangkauan yang rendah akan menyebabkan sukarnya suatu daerah mencapai kemajuan, sebaliknya semakin daerah itu mudah dijangkau maka semakin mudah daerah itu mengalami kemajuan. Dari hal tersebut di atas jelaslah bahwa jarak yang jauh dari rumah akan sulit dicapai dan membutuhkan banyak biaya dengan kondisi jalan yang kurang baik. Kondisi jalan di Kecamatan Dedai masih dalam kategori kurang baik, berlumpur dan berlubang dengan kedalaman yang cukup dalam, becek tergenang air serta licin sehingga membuat siswa di daerah ini sulit untuk menuju ke sekolah dengan akses yang baik.



Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang diungkapkan bahwa pada umumnya di wilayah pedalaman Kabupaten Sintang masalah transportasi masyarakat dan akses siswa khususnya di Kecamatan banyak masyarakat hanya memiliki satu kendaraan saja. Siswa pergi ke sekolah dan pulang sekolah berjalan kaki sehingga hal ini menjadi faktor penghambat untuk anak-anak di daerah dalam menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan yang lebih layak dan bermutu, setara dan adil yang diprogramkan dalam program wajib belajar sembilan tahun.

## **B. Faktor Lingkungan Politik dalam Kebijakan Wajib Belajar**

Kebijakan pendidikan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sintang di Kecamatan Dedai dalam kebijakan wajib Belajar sembilan tahun dalam upaya meningkatkan pendidikan memiliki beberapa faktor pendukung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri dan Swasta dalam diungkapkan bahwa.

*“...ketersediaan sarana untuk sekolah dan media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Selain kegiatan sosialisasi yang di lakukan oleh sekolah-sekolah dalam menyerap aspirasi serta keluhan masyarakat secara langsung, sarana komunikasi antara Dinas Pendidikan dan masyarakat dilakukan dengan kegiatan evaluasi rutin setiap bulan oleh Dinas Pendidikan. Kedua, ketersediaan alokasi anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBD. Pemerintah daerah Kabupaten Sintang sudah sangat peduli dengan pendidikan, hal ini terlihat dari pengalokasian anggaran untuk kegiatan dalam bidang pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBD dimana jumlahnya berkisar 20 persen sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Ketiga, ketersediaan*

*sumber daya manusia (SDM) dalam implementasi kebijakan pendidikan.”*

Dari total jumlah pegawai negeri di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang yang berjumlah 472 orang, lebih dari setengahnya merupakan pegawai dinas pendidikan. Jumlah ini mayoritasnya merupakan tenaga pengajar (guru) sehingga dapat dikatakan jumlah sumber daya manusia bidang pendidikan sudah sangat memadai. Kondisi ini diperkuat dengan hasil penegasan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait kebijakan program wajib belajar sembilan tahun menjelaskan bahwa:

*“...kebijakan pendidikan yang dilakukan Dinas Pendidikan di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang dalam upaya meningkatkan pendidikan wajib belajar sembilan tahun masih menemui beberapa hambatan seperti persebaran tenaga pengajar yang belum merata. Jumlah tenaga pengajar berkualitas lebih banyak terkonsentrasi di wilayah kota kecamatan, sementara di pedesaan daerah pedalaman masih sangat minim jumlahnya. Kondisi ini diperparah dengan pemahaman yang minim dari masyarakat desa dan pedalaman terhadap pendidikan dan kebijakan pendidikan sehingga berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan maupun indeks pembangunan manusia di Kecamatan Dedai.”*

Terkait kebijakan pendidikan kepala Sekolah SMP Negeri maupun Swasta di Kecamatan Dedai mengeluhkan kurang jelasnya pelimpahan wewenang terkait kebijakan program wajib belajar sembilan tahun dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten, dinas pendidikan sampai ke level sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diungkapkan bahwa:



*...Dinas Pendidikan telah melakukan perencanaan partisipatif secara bottom-up planning dengan melibatkan sekolah bersama masyarakat dari tingkat yang paling bawah melalui sosialisasi. Namun dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun di lapangan masih menemui beberapa hambatan, salah satunya terkait dengan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan terutama terjadi di pedesaan. Kemudian, untuk kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan saat ini hanya sekedar evaluasi terhadap penyerapan anggaran kegiatan yang berfokus pada tujuan pencapaian output saja sesuai item kegiatan semata."*

### **C. Faktor Lingkungan Teknologi dalam Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun**

Teknologi merupakan suatu kesatuan yang integral mendukung program wajib belajar sembilan tahun dalam mewujudkan kualitas sumberdaya manusia. Pentingnya menguasai teknologi tidak terlepas dari indikator teknologi seperti infrastruktur teknologi, sarana kemajuan, aset dalam pencapaian tujuan dan inovasi pendidikan sesuai suatu standar mutu teknologi di setiap satuan pendidikan (Dike, & Parida, 2016). Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri dan Swasta di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang terkait teknologi dalam program wajib belajar sembilan tahun disimpulkan bahwa:

*...Teknologi merupakan suatu sarana dalam memajukan kualitas sumberdaya manusia, sesuai dengan kemampuan melakukan transformasi teknologi (alih teknologi modern), yang menjadi aset investasi individu yang mampu menguasai IPTEK dan menjadi inovasi bagi perkembangan dunia pendidikan dan teknologi."*

Mengenai penguasaan teknologi di wilayah sekolah kecamatan Dedai mengalami beberapa kendala dalam implementasinya. Orangtua siswa yang menjadi pengurus Komite Sekolah menyatakan bahwa kendala utama dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yang dihadapi guru dan siswa di sekolah Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang adalah sarana dan prasarana pendukung yang terbatas. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah komputer, laptop, dan infokus. Kendala berikutnya yang cukup tinggi mempengaruhi guru dan siswa dalam memanfaatkan TIK dalam pembelajaran adalah ketersediaan jaringan internet dan sinyal yang belum memadai disebabkan juga oleh belum adanya ketersediaan listrik.

Pengetahuan teknis guru dan siswa tentang teknologi informasi dan komunikasi yang terbatas juga menjadi kendala belum optimalnya pemanfaatan TIK untuk pembelajaran di kelas. Aspek lain adalah ketakutan akan dampak negatif dari penggunaan alat berupa handphone (HP) dan laptop di sekolah. Hal ini juga belum adanya kebijakan pemanfaatan handphone dalam pembelajaran di kelas. Sekolah belum berani dan belum membuat kebijakan yang jelas dengan pedoman yang jelas karena sebagian besar guru dan orangtua masih memiliki pertimbangan etis dan masih kuatnya perasaan takut akan penyalahgunaan teknologi sehingga sampai saat ini sekolah melarang siswa membawa *hand phone* ke sekolah.

Pada level guru terdeteksi masih banyak guru belum mampu mengintegrasikan TIK dalam pengajaran mereka sehingga sikap



guru terhadap TIK menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan TIK di dalam inovasi pengajaran. Bukti empiris untuk mengklaim bahwa kepercayaan guru tentang praktik mengajar adalah penting dalam menjelaskan mengapa guru perlu mengadopsi teknologi digital dalam pengajaran mereka sebagai tuntutan dalam pembelajaran era 4.0. Banyak guru takut menggunakan TIK dalam pengajaran mereka dan menjadi cemas ketika harus menggunakan pengetahuan TIK. Para guru belum terbiasa dan terlatih secara terampil dalam menggunakan TIK dalam pembelajaran mereka dan hal itu terlihat pada masa pandemi covid 19 (Daniel Dike et al., 2022). Kondisi ini merupakan masalah klasik dimana guru di daerah dan sekolah pedalaman merasakan sulitnya memiliki akses komputer. Guru sendiri mengidentifikasi kekurangan jumlah komputer, jumlah salinan perangkat lunak, dan kurangnya akses internet simultan sebagai hambatan utama untuk implementasi TIK di institusi pendidikan. Meskipun dari sisi mutu aksesibilitas sumber daya TIK tidak menjamin keberhasilan implementasi dalam pengajaran (Candls, 2019; Wasley et al., 2004).

## SIMPULAN

Implementasi program pendidikan wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan social, ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua yang masih rendah dan minim sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun.
2. Faktor geografis dan jarak tempuh yang jauh antara rumah dan sekolah

sekitar 3-4 jam dengan moda transportasi yang minim dan sulit menjadi salah satu penyebab kurang berhasilnya program wajib belajar sembilan tahun di kecamatan Dedai, kabupaten Sintang. Ketika musim hujan anak didik sampai di sekolah dengan pakaian yang basah dan kotor dikarenakan lumpur, sementara saat kondisi kemarau siswa datang di sekolah dengan kondisi penuh keringat dan lelah.

3. Faktor lingkungan politik dalam pendidikan terkait program wajib belajar sembilan tahun dipengaruhi oleh kebijakan penyediaan sarana sekolah seperti fasilitas gedung, ruan kelas, meja, kursi, dan peralatan pendidikan yang masih minim. Infrastruktur teknologi dan jaringan listrik dan internet yang belum memadai menjadi faktor penghambat tercapainya program wajib belajar sembilan tahun.
4. Minimnya tenaga pendidik yang berkualitas di daerah pedesaan dan pedalaman kecamatan Dedai ikut berkontribusi bagi kurang berhasilnya program wajib belajar sembilan tahun. Satu sekolah hanya memiliki tenaga guru berjumlah 4-5 orang sehingga belum optimal dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun di kecamatan Dedai.

## DAFTAR RUJUKAN

- Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. *The Qualitative Report*, 13(4), 544–559. <https://doi.org/citeulike-article-id:6670384>
- BPS Kabupaten Sintang. (2020). *Indeks pembangunan manusia di kabupaten Sintang tahun 2015-2019*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang. <https://sintangkab.bps.go.id/>
- Candls. (2019, January). Teaching as a process. *Georgetown University*, 1–2. <https://cndls.georgetown.edu/atprogram/t>



- wl/effective-teacher/
- Creswell, J. (2015). *Riset Pendidikan* (S. . Soectjpto, H.P., & Soetjpto (ed.); Terjemahan). Pustaka Pelajar.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. SAGE Publications.
- Dike, Daniel, & Parida, L. (2016). Persepsi dan konsepsi mutu pendidikan sekolah dasar. *Pendidikan Dasar PerKhasa*, 2(2), 197–211.  
<http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPDP/article/view/112/122>
- Dike, D. (2017). Pendidikan multikultural sekolah dasar di wilayah 3T. *Pendidikan Dasar PerKhasa*, 3(April), 277–287.  
<http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPDP/article/view/112/122>
- Dike, D., Parida, L., & Welerubun, I. (2020). Teachers' awareness on multicultural values and attitudes: A case of multicultural education in Indonesian elementary schools. *Journal of Critical Reviews*, 7(7).  
<https://doi.org/10.31838/jcr.07.07.151>
- Dike, Daniel, Parida, L., & Atawolo, G. S. (2022). Adaptasi budaya belajar masa pandemi covid 19 di sekolah dasar kabupaten sintang. *Vox Edukasi*, 1(13), 1–14.  
<https://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/VOX/article/download/1535/pdf>
- Dike, Daniel, Parida, L., & Stevanus, I. (2020). Micro strategy and character educational transformation in elementary school during the covid-19 pandemic of sintang distric, west kalimantan province. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(8), 775–786.  
[https://ejmcm.com/article\\_3196.html](https://ejmcm.com/article_3196.html)
- Herwanto. (2007). Wajib belajar sembilan tahun (wajar) dalam perspektif peningkatan mutu pendidikan dasar. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 16, 77–86.  
<https://ojs.stkipgri-lubuklinggau.ac.id>
- Indra Akuntono. (2012, August). Wajib belajar 9 tahun dinilai belum tuntas. *Kompas.Com*.  
<https://edukasi.kompas.com>
- Ismail. (2014). Analisis arah kebijakan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dan berkualitas di kota makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 15–29.  
<https://ojs.unm.ac.id>
- Jamun, Y. M. (1996). *Dampak teknologi terhadap pendidikan*. 10, 48–52.
- Soedjono. (2022). Transformasi digital manajemen pendidikan. *Media Penelitian Pendidikan: Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Dan Pengajaran*, 16(1), 103–107.  
<https://doi.org/https://dx.org/10.26877/mpp.v16i1.12148>
- Stake, R. E. (2005). Qualitative case studies. In N.K. Denzin & Y. . Lincoln (Eds.), *The Sage Handbook of Qualitative Research* (pp. 443–466). Sage Publications Ltd.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfa Beta.
- Sistem Pendidikan Nasional, (2003).
- Wasley, P. a, Lieberman, A., Mcdonald, J. P., & Talbert, J. E. (2004). *The teaching career: The series on school reform* (J. . Goodlad, I., & McMannon (ed.)). Teachers College Press.
- Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Sage Publications, Inc.

